

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau sering juga disebut sebagai PIPPK, merupakan program dari perwujudan dari otonomi daerah yang telah terlaksana di Kota Bandung sejak tahun 2015 lalu dengan tujuan untuk memberikan pemerataan pembangunan disetiap wilayah di Kota Bandung.

Sejalan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerahnya masing-masing. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang mana inovasi daerah disini berarti semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Maka, pelaksanaan PIPPK ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi, peran, dan tugas instansi pemerintahan dan juga dapat memberdayakan *public* dengan berbasas kedaerahan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung No 436 Tahun 2015 tentang PIPPK. Selain aparat pemerintahan PIPPK ini juga dikelola dan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, serta Kelurahan dan Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK dipaparkan bahwa jenis program atau kegiatan dalam PIPPK berbasis pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengakomodasi pemberdayaan lingkup RW yang meliputi infrastruktur, social kemasyarakatan, penguatan kelembagaan lingkup RW, mengadakan praktik ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkup RW, serta pemberdayaan, inovasi dan potensi ekonomi masyarakat lingkup RW.
- b. Fasilitasi pemberdayaan lingkup PKK yang meliputi penguatan kelembagaan lingkup PKK dan pelaksanaan kegiatan lingkup pokja PKK.
- c. Fasilitasi pemberdayaan lingkup karang taruna yang meliputi penguatan kelembagaan lingkup karang taruna, penyelenggaraan kesejahteraan social, pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP), serta penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olahraga dan kesenian.
- d. Fasilitasi pemberdayaan lingkup LPM yang meliputi penguatan kelembagaan lingkup RW, peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan kewilayahan, pelaksanaan penyusunan perencanaan partisipatif pembangunan kewilayahan, pelaksanaan teknis operasional pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan pembangunan partisipatif di kewilayahan, menghitung partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan, serta pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Eratnya hubungan antara masyarakat dan pihak pelaksana PIPPK dalam hal ini diturunkan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan pihak Kelurahan membutuhkan koordinasi yang baik didalam proses pelaksanaan PIPPK. Pengorganisasian yang baik antara aparatur pemerintah dengan LKK pelaksana PIPPK menjadi fokus utama didalam melaksanakan program tersebut agar dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kapasitas aparatur pemerintah dalam PIPPK ini adalah membina, mengarahkan, dan melakukan pengawasan. Sedangkan kapasitas LKK dalam PIPPK ini berperan sebagai pelaksana kegiatan, namun tidak sedikit juga LKK yang tidak tahu mengenai bagaimana proses pelaksanaan PIPPK, sehingga instansi pemerintahan harus terus memantau, berkontribusi, dan menyokong semua kebutuhan.

Kelurahan Sekejati adalah salah satu dari empat kelurahan yang berada di Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang juga melaksanakan PIPPK. Pada pelaksanaannya PIPPK di Kelurahan Sekejati ini berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) PIPPK pada tahun 2017-2019 dapat dibidang masih belum stabil baik itu dari segi penyerapan anggaran ataupun dari segi pelaksanaan PIPPK. Dan untuk itu perlu dilakukan analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja pada PIPPK, dengan tujuan agar kedepannya Kelurahan Sekejati dapat memaksimalkan penyerapan anggaran PIPPK secara efisien dan efektif.

Dalam mengelola keuangan daerah, akan selalu menemukan kendala yang dihadapi, terutama mengenai permasalahan anggaran belanja PIPPK, pastinya akan dialami oleh Kelurahan Sekejati. Misalnya pada hasil perolehan juga

sasaran yang ternyata tidak sejalan dengan kinerja keuangan dikarenakan tahap realisasinya yang sedikit ataupun kebalikannya, juga adanya transisi sasaran pengaktualan secara tidak tetap sehingga terjadi transisi yang fluktuatif di tiap tahunnya, dan inilah yang dapat menandakan suatu instansi tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dan berikut pemneliti sampaikan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati:

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja PIPPK Tahun 2017-2019

Tahun	Lembaga	Anggaran Belanja	Realisasi	Presentase
2017	RW	1,398,847,745.00	1,378,077,250.00	98.52%
	PKK	100,000,324.00	99,768,928.00	99.77%
	Karang Taruna	96,740,747.00	95,412,500.00	98.63%
	LPM	99,310,241.00	98,667,500.00	99.35%
	Jumlah	1,694,899,057.00	1,671,926,178.00	98.64%
2018	RW	948,430,237.02	794,227,325.00	83.74%
	PKK	58,650,000.00	50,148,000.00	85.50%
	Karang Taruna	88,615,000.00	84,636,000.00	95.51%
	LPM	74,929,950.00	64,011,300.00	85.43%
	Jumlah	1,170,625,187.02	993,022,625.00	84.83%
2019	RW	1,399,999,954.00	1,347,394,668.00	96.24%
	PKK	100,000,000.00	89,326,800.00	89.33%
	Karang Taruna	100,000,000.00	98,945,000.00	98.95%
	LPM	100,000,000.00	92,966,000.00	92.97%
	Jumlah	1,699,999,954.00	1,628,632,468.00	95.80%

Sumber Data : Kelurahan Sekejati Kota Bandung 2017-2019

Bedasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja PIPPK Kelurahan Sekejati Kota Bandung sangat fluktuatif dan mengalami peningkatan juga penurunan ditiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi anggaran belanja PIPPK mencapai 98.64% kemudian pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja PIPPK mengalami penurunan mencapai 84.83% lalu pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja PIPPK mengalami peningkatan Kembali mencapai

95.80% dan hal ini menjadikan anggaran belanja PIPPK mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Dalam penyerapan *budget* yang telah diberikan oleh instansi daerah kepada Kelurahan selaku SKPD pada akhirnya akan menimbulkan dua aspek, aspek yang pertama akan menunjukkan ada atau tidaknya efisiensi pada anggaran belanja tersebut, dan aspek yang kedua akan menunjukkan efektivitas pada perencanaan anggaran belanja juga pelaksanaan programnya, apakah perencanaannya sudah baik atau belum ataupun apakah semua program telah dilaksanakan atau belum.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran belanja PIPPK yang mana belum optimalnya penyerapan anggaran juga pelaksanaan programnya. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Wilayah (PIPPK) pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung Tahun 2017-2019”**

B. Identifikasi Masalah

Realisasi Anggaran Belanja PIPPK Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019 dilihat dari laporan realisasi anggaran belanjanya belum terealisasi dengan baik dan juga mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya atau dapat disebut juga dengan fluktuatif.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *input* pada efisiensi anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019?
2. Bagaimana *output* pada efisiensi anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019?
3. Bagaimana *output* pada efektivitas anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019?
4. Bagaimana *outcome* pada efektivitas anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana *input* pada efisiensi anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana *output* pada efisiensi anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana *output* pada efektivitas anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui bagaimana *outcome* pada efektivitas anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati Kota Bandung pada tahun 2017-2019.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk teori sebagai sumber literatur dan sebagai salahsatu sumber acuan dalam jurusan administrasi public dengan konsentrasi keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, pandangan dan penguasaan fungsi keilmuan yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan Administrasi Public di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, dan juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran khususnya pada anggaran belanja PIPPK pada Kelurahan Sekejati.

F. Kerangka Penelitian

Administrasi publik merupakan bentuk Kerjasama administrative yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan Bersama. Tujuan administrasi publik adalah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan terhadap masyarakat yang baik, efektif, dan efisien tanpa mementingkan unsur-unsur profit. (Anggara, 2015, p. 48)

Keuangan daerah merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

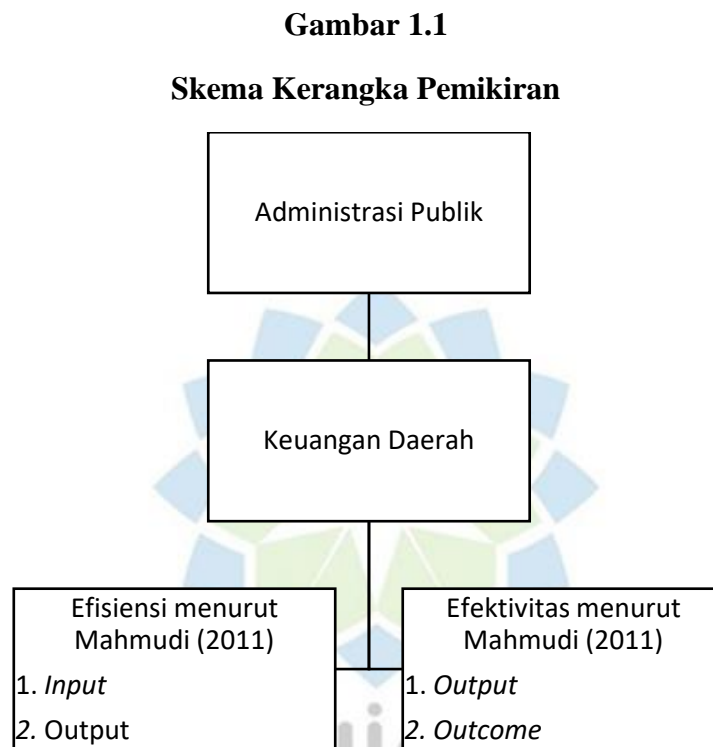
Menurut (Mahmudi, 2011, p. 5) efisiensi merupakan korelasi antara keluaran berupa produk yang didukung oleh sumber daya. Suatu kelompok, rancangan, atau aksi disebut *efficient* jika menghasilkan keluaran tertentu dengan masukan sekecil-kecilnya, atau dengan masukan tertentu mampu menghasilkan keluaran setinggi-tingginya, dan disini yang menjadi unsur efisiensi adalah :

1. *Input* yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.
2. *Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan.

Adapun menurut (Mahmudi, 2011, pp. 5–6) efektivitas merupakan perpadanan antara *outcome* dengan keluaran. Hasil atau target yang diinginkan ialah *outcome*, sementara itu, hasil yang didapatkan adalah *output*. Suatu kelompok, rancangan, atau aksi termasuk *effective* jika keluaran yang didapatkan mampu memaksimalkan tujuan yang diinginkan atau anggaran dipakai dengan baik (*spending wisely*). dan disini yang menjadi unsur efektivitas adalah :

1. *Output* merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh suatu kebijakan, program, dan aktivitas.
2. *Outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu dan sering kali dikaitkan dengan tujuan atau target yang hendak dicapai.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka, peneliti menyajikan skema kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Sumber: Dibuat oleh peneliti 2021
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG